Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Secara Langsung

Sunyoto Usman

Direct presidential election system is not always a guarantee to choose that the chosen leader is always the best to govern this nation. In democration process we find some factors that not always rational and objective to choose the leader. It can depend on subyektif emtional factors which lie behind the primordialisme and also, we can’t ne-glect the factor of personal benefit orientation as a result of mony politics. The election system must encourage that only candidate who have morality, integrity and capability and support from the more people that will emerge to bring the good of the society and nations.

Tidak bangsa ini menyelenggarakam pemilihan umum yang jujur dan adil mencuat ke permukaan kuant sekali. Kuatnya tekan itu antara lain tereksi pada kesepakatan politik menyelenggaraman pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung dalam pemilihan umum yang akan instal. Melalui sitem ini diyakini bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung dapat menghasilkan pemimpin yang bukan hanya berkualitas tetapi juga dekat dengan rakyat pemilih. Melalui sistem ini pula rakyat diharapkan tidak lagi terus menerus dirugikan oleh pelbagai bentuk persengkakan dan permainan politik yang tidak terpuji yang dilakukan para wakil rakyat yang ada di parlemen. Melalui sistem ini, proses rekrutmen presiden dan wakil presiden menjadi lebih transparan, kompetisi lebih fair, dan partisipasi rakyat pemilihpun menjadi lebih besar. Seperti telah banyak dilontarkan pengamat politik, bahwa transparansi, kompetisi dan partisipasi masih menjadi barang langka di negara ini. Karena itu tidak mengherankan apabila masih banyak diketemukan politisi, pejabat atau intelektual yang ucapannya berbuih demokrasi, tapi tindakannya tidak demokratis.

Pengalaman Pertama

Topik: Pemilu dan Pemilihan Presiden & Wakil Presiden

mayoritas mutlak, sehingga dibutuhkan koalisi dengan partai-partai lain. Namun demikian, mereka juga kelihatannya tidak gebabah menentukan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang kelak akan didukung. Karena kesalahan dalam menentukan pasangan itu bisa berakibat fatal bagi kehidupan partainya.

Pertanyaannya kemudian adalah benarkah sistim pemilihan presiden dan wakil presiden semacam itu akan melahirkan pemimpin yang berkualitas dan dekat dengan rakyat pemilih? Tidak muda menjawabnya, karena proses memilih figur pemimpin sebenarnya dipengaruhi oleh pelbagai macam faktor yang tidak selamanya bersifat objektif-rasional, atau di atas pertimbangan yang dilandasi nalar yang jelas. Proses memilih figur pemimpin bisa dipengaruhi oleh faktor yang bersifat subyektif-emosional produk dari bekerjanya ikatan primordial yang bersumber pada otoritas tradisional, serta di atas pertimbangan memperoleh keuntungan pribadi (materi) berkat bekerjanya mesin money politics. Oleh karena itu, seperti pengalaman yang diperlihatkan oleh banyak negara, sistim pemilihan presiden dan wakil presiden boleh jadi memang mendekatkan pemimpin dengan rakyat pemilih, tetapi tidak selamanya mampu melahirkan pemimpin yang berkualitas, atau benar-benar memiliki kemampuan mandal mengatasi krisis ekonomi maupun politik.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemilih

Dalam beberapa bulan terakhir ini telah dilakukan sejumlah polling baik oleh media massa, lembaga swadaya masyarakat, maupun oleh perguruan tinggi mengenai siapa di antara tokoh partai yang layak menjadi presiden republik ini. Hasil yang mereka peroleh ternyata bervariasi. Seorang tokoh yang memperoleh ranking tertinggi dari polling yang dilakukan oleh lembaga tertentu, ternyata hanya berada di urutan tengah, atau bahkan berada di papan bawah; dari polling yang dilakukan oleh lembaga tertentu lainnya, dan demikian pula sebaliknya. Boleh jadi metode polling yang mereka terapkan berbeda, tetapi satu hal yang telah lama menandai kehidupan politik bangsa ini adalah tidak menentu arahnya. Seorang tokoh politik yang semula dimaki karena dianggap tidak cerdas dalam berpolitik, bisa berubah dielu-elukan baik pahlawan yang baru memenangkan peperangan. Seorang tokoh politik yang semula dimaki karena dituduh sebagai bendera korupsi, bisa berubah dipuji dan dijagokan sebagai figur alternatif yang diharapkan memimpin bangsa ini. Itulah sebabnya bukan hanya tidak mudah membuat analisis tentang situasi yang bakal terjadi dalam proses pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung nanti, tetapi juga tidak mudah memprediksi bagaimana karakteristik kepemimpinan yang kelak lahir dari proses semacam itu.

Banyak studi telah memperlihatkan bahwa tindakan memilih, termasuk memilih calon presiden dan wakil presiden, bisa dipengaruhi oleh banyak faktor yang melekat dalam status sosial-ekonomi, kultur maupun struktur sosial.1 Karena itu mereka yang tergolong dalam status sosial ekonomi atas memiliki tindakan memilih yang berbeda dengan mereka yang tergolong dalam status sosial ekonomi bawah atau menengah. Mereka yang berasal dari kalangan tradisional-agraris memiliki tindakan memilih

yang berlainan dengan mereka yang berasal dari kalangan modern-industrial. Demikian pula mereka yang berasal dari kalangan masyarakat yang ditandai oleh struktur kekuasaan yang monolitik, atau dalam bingkai otoritas tradisional, mempunyai tindakan-memilih yang berlainan dengan mereka yang berasal dari kalangan masyarakat yang ditandai oleh struktur kekuasaan yang pluralis, atau dalam bingkai otoritas rasional.

Apabila pandangan semacam itu dipergunakan sebagai referensi, maka proses pemilihan presiden dan wakil presiden dalam pemilu nanti diperkirakan diwarnai oleh tindakan memilih yang bervariasi. Tindakan memilih mereka yang berasal dari kalangan masyarakat urban, atau yang mayoritas terdidik, diperkirakan sudah dalam bingkai pertimbangan obyektif-rasional. Sebagian besar kalangan ini akan memilih calon presiden dan calon wakil presiden yang memiliki program-program yang jelas, atau yang diperkirakan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti: mengentaskan kemiskinan, menciptakan lapangan kerja dan menekan angka pengangguran, meningkatkan pendidikan dan sejenisnya. Kalangan ini memiliki kemampuan melakukan evaluasi, karena diperkirakan lebih menekankan pada apa yang bisa dikerjakan oleh calon presiden dan wakil presiden itu, bukan pada dari rahim siapa dilahirkan. Tindakan memilih semacam itu diperkirakan akan dominan di Jakarta dan di ibukota propinsi.

Sementara itu tindakan memilih mereka yang berasal dari kalangan masyarakat pedesaan, atau yang mayoritas berpendidikan rendah, masih didominasi oleh pertimbangan subjektif-emosional. Kalangan ini kurang memiliki kemampuan melakukan evaluasi, karena itu kurang begitu memperhatikan program-program yang ditawarkan oleh calon presiden dan calon wakil presiden yang kelak berkompetisi. Bagi mereka program-program yang ditawarkan tersebut tidak lebih kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang disepakati. Karena itu tidak dapat dijadikan sebagai ukuran dalam menentukan tindakan memilih. Basis yang mereka gunakan untuk menarik kualitas atau kapabilitas calon presiden dan wakil presiden berdasarkan ukuran-ukuran subjektif-yang mereka kembangkan berdasarkan logikanya sendiri, yang bisa berbeda dengan ukuran-ukuran normatif yang lazim dipergunakan untuk memilih calon presiden dan wakil presiden seperti spirit, integritas serta kapasitas.

Pemilihan umum yang akan datang diperkirakan masih kental diwarnai oleh primordialisme, terutama dalam bingkai ikatan agama dan etnis. Kalangan Islam tradisional (berbasis pesantren) akan mempunyai tindakan memilih yang berbeda dengan kalangan Islam perkotaan (berbasis kampus dan jamaah pengajian). Kecenderungan tindakan memilih yang tumbuh dan berkembang di kalangan mereka berbeda pula dengan kelompok nasionalis (terutama yang tergolong abangan) dan non-muslim. Kemudian, kalangan etnis tertentu juga memiliki tindakan memilih yang berbeda dengan kalangan etnis tertentu lainnya. Etnis yang berbeda tersebut boleh jadi memiliki kepercayaan yang sama, jenis pekerjaan yang kurang lebih sama, atau berada dalam lingkungan masyarakat dengan kondisi geografis dan sosial ekonomi yang kurang lebih sama, tetapi tindakan memilih yang berkembang di kalangan mereka bisa berbeda, bahkan mungkin bertolak belakang sekali. Bagi mereka, tindakan memilih tidaklah digerakkan oleh kemauan berpartisipasi dengan menggunakan hak.
Topik: Pemilu dan Pemilihan Presiden & Wakil Presiden

politiknya, tetapi lebih karena memenuhi kewajiban yang diperintahkan oleh komunitas agama atau etnis tempat berasal dan dari bekerjanya otoritas tradisional ini dalam masyarakat.

Pertanyaan selanjutnya adalah karakteristik presiden dan wakil presiden seperti apa kelak yang akan terpilih memimpin bangsa ini? Apabila nanti kalangan pemilih yang tergolong obyektif-rasional dominan mempengaruhi proses pemilihan umum, dan pikiran-pikiran cerdas mereka menjadi referensi rakyat ketika hendak menentukan pilihannya, maka boleh jadi kita akan memiliki presiden dan wakil presiden yang populer sekaligus cerdas, dalam arti memiliki kemauan, kemampuan dan ketahuan yang memadai memimpin bangsa ini. Sebaliknya, apabila yang dominan justru kalangan pemilih yang tergolong subyektif-emosional, atau yang tindakan memilihnya lebih dipengaruhi oleh ikatan-ikatan primordial (agama, etnis, daerah) dan dalam konteks ini, boleh jadi presiden dan wakil presiden itu populer karena memperoleh dukungan dari banyak lapisan masyarakat, tetapi belum tentu capabel.

Jaminan Memperoleh Pemimpin yang Kapabel

Model pemilihan presiden secara langsung (popular votes) memiliki dua macam sistim yaitu simple majority dan plurality system. Dalam sistim simple majority pasangan calon presiden dan wakil presiden yang memperoleh suara 'setengah plus

---

2. Karl D. Jackson dan Johannes Moeliono, 'Participation in Rebellion: The Da'i'ul Islam in West Java', dalam R. William Liddle, Political Participation in Modern Indonesia, Monograph Series No. 19, Yale University Southeast Asia Studies, 1973, pp. 17-18
Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Secara Langsung, Sunyoto Usman


Argumentasi tersebut cukup nalar, tetapi sejumlah pengamat yakin bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum yang akan datang masih akan diwarnai money politics. Konon partai-partai yang kini berkompetisi tidak sedikit yang memilik dana dalam jumlah besar, dan lebih dari cukup untuk menyogok pemilih andaikata mereka mau. Strateginya mungkin tidak langsung memberikan uang kepada pemilih, tetapi melalui jaringan sel-sel partai yang telah dibangun. Sel-sel partai berfungsi sebagai semacam broker, makelar yang menjembatani kemauan para pemilih dan kemampuan botol. Dalam hal-hal tertentu, sel-sel tersebut juga bisa menjadi bagian penting dari kegiatan vote getters dengan melakukan intimidasi kepada para pemilih. Dalam konteks ini, para pemilih menjadi dalam posisi terjepit di antara sel-sel dari berbagai macam partai. Mereka tidak ditempatkan sebagai subyek yang dipinang dengan berbagai macam program yang menghadirkan kesejahteraan rakyat, tetapi sebagai obyek yang hampir tidak memiliki posisi tawar politik.

Apabila mekanisme semacam itu yang berjalan, maka kita kelak boleh jadi akan memiliki presiden dan wakil presiden yang populer tetapi tidak bermoral. Mereka adalah pemimpin yang mengabdi pada kemauan preman politik, dan bukan mustahil selama memangku jabatan akan melakukan pelbagai bentuk pemerasan mencari pulihan dana yang dahulu pernah dipergunakan untuk menggalang dukungan rakyat. Korupsi dan pelbagai bentuk persengkokokan akan semakin merajalela, agenda reformasi menjadi semakin sukar diwujudkan, dan rakyat menjadi semakin sengsara. Apabila hal demikian sampai terjadi, maka pemilihan presiden dan wakil presiden bukanlah instrumen untuk memecahkan masalah, bukan pula sebagai mekanisme untuk meredam kemungkinan unfair competition, tetapi justru bagian dari masalah itu sendiri. Klaim politik semakin carut-marut, dan kedaulatan dan kemandirian semakin jauh letaknya.
Topik: Pemilu dan Pemilihan Presiden & Wakil Presiden


Daftar Pustaka


Liddle, R. William, 1973, Political Participation in Modern Indonesia, Monograph Series No. 19, Yale University Southeast Asia Studies.